

PENGARUH *FISCAL STRESS* TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN DAN PENDAPATAN PERKAPITA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Ida Farida Adi Prawira
Universitas Pendidikan Indonesia
ida.farida@upi.edu

Mitha Krismayanti
Universitas Pendidikan Indonesia
mithakrismayanti63@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *fiscal stress* terhadap tingkat kejahatan pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2015, pengaruh *fiscal stress* terhadap pendapatan perkapita pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2015. Unit analisis adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 508 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia, pemilihan sampel ditentukan berdasarkan kriteria *purposive sampling* sehingga didapatkan 53 pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Pajak Keuangan (DJPK) berupa Laporan Realisasi Keuangan (LRA) dan *website* Badan Pusat Statistik (BPS). Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *software* *Eviews* 9. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa *Fiscal stress* berpengaruh terhadap tingkat kejahatan secara negatif, dan *Fiscal stress* berpengaruh terhadap pendapatan perkapita secara negatif. Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Kata kunci: Fiskal Stress, Tingkat Pendapatan Perkapita

Abstract

The study is intended to find out how she applies stress to the crime rates of the Indonesian district/city government in 2014-2015, how she applies to the cost of per capita income to the Indonesian district/city government in 2014-2015. The analysis unit is the Indonesian district and city government. The population of this research is 508 counties and cities in Indonesia, a sample selection defined by purposive sampling criteria to be found at 53 county/city governments samples in this study. The data used is a secondary data obtained from the directorate general of financial tax (DJPK) reports of financial realization (IRA) and statistics center website (BPS). The hypothetical test tool in this research is using *eviews* 9 software. From the test results it has been that the prosecutor for stress has influenced the crime rate negatively and the fiscal stress is affecting per capita income negatively.

Keywords: Fiscal Stress, Crime Rate, Income Per Capita

1. PENDAHULUAN

Dalam keadaan keuangan saat ini, pemerintah daerah belum mampu menghadapi *fiscal stress* terutama yang diakibatkan dari terjadinya defisit anggaran (Thompson, 2017; Prawira & Darus, 2018; Prawira & Septira, 2019). Jumlah

pemerintah daerah yang dianggap mengalami “*significant fiscal stress*” meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Lebih sedikit pemerintah daerah yang mengalami *fiscal stress*, tetapi pemerintah daerah yang memiliki masalah keuangan secara terus-menerus harus berjuang untuk tetap keluar dan memperbaiki masalah. Meskipun beberapa daerah menunjukkan hasil yang baik, terdapat kotamadya yang harus tetap fokus pada risiko keuangan jangka pendek dan menerapkan perencanaan jangka panjang yang lebih bijaksana” menurut DiNapoli.

Demikian pula bahwa adanya indikasi *fiscal stress* yang terjadi di Indonesia, dengan diberlakukannya otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk menggali sendiri potensi penerimaan daerah untuk membiayai penegeluaran pemerintahan.

Tabel 1.1 Tren APBD Kabupaten dan Kota Tahun 2014-2016 (dalam Triliun)

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Presentase
2010	448,82	439,7	9,12	2,03
2011	8.639,61	8.149,31	490,3	5,68
2012	10.363,07	9.796,20	566,87	5,47
2013	11.714,81	12.350,31	-635,5	-5,43
2014	12.703,60	13.093,11	-389,51	-3,07
2015	12.179,60	12.947,89	-768,29	-6,31
2016	1.003,14	1.002,34	0,8	0,08
2017	14.983,13	18.700,94	-3.717,81	-24,81

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (2018)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa adanya indikasi *fiscal stress* yang terjadi pada kabupaten dan kota di Indonesia, menurut data yang bersumber dari (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018) tren APBD kabupaten dan kota di Indonesia tersebut menunjukkan pada tahun 2010 hingga tahun 2012 masih mengalami surplus. Pada tahun 2010 kabupaten dan kota mengalami surplus hanya 2,03% meningkat pada tahun 2011 surplus menjadi 5,68% dan pada tahun 2012 sebesar 5,47%. Sedangkan pada tahun 2013 kabupaten dan kota di Indonesia mulai mengalami defisit yaitu sebesar -5,43% , tahun 2014 mengalami penurunan defisit menjadi -3,07% , dan defisit kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar -6,31%. Tahun 2016 kabupaten dan kota di Indonesia kembali mengalami surplus walaupun hanya 0,08% dan tahun berikutnya ternyata kembali mengalami defisit mencapai -24,81%, jika dilihat dari tahun sebelumnya dapat dikatakan defisit yang terjadi pada tahun 2017 tersebut merupakan defisit terbesar.

Beberapa penelitian yang meneliti mengenai reaksi terhadap masalah anggaran, berfokus pada perubahan yang dilakukan terhadap keuangan akibat dari defisit anggaran dan menemukan bahwa banyak pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan dalam mencari sumber pendapatan tambahan, termasuk peningkatan dana bantuan pemerintah pusat, pajak daerah dan biaya pengguna (Pagano, 1993). Pemerintah daerah mengurangi pengeluaran administratif (Forrester & Spindler, 1990) dan menunda pengeluaran modal hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan anggaran, hingga terpaksa untuk melakukan pengurangan terhadap layanan publik yang penting (Maher & Deller, 2007).

Skidmore & Scorsone (2011) meneliti pengaruh dari *fiscal stress* terhadap penyediaan layanan publik. Menggunakan indikator *fiscal stress* yang mengukur irisan antara biaya penyediaan layanan publik dan pendapatan yang dihasilkan. Menunjukkan bahwa *fiscal stress* mengakibatkan pemotongan terhadap pengeluaran pemerintah, pekerjaan umum, taman dan hiburan, dan pengeluarannya lainnya. Sedangkan keselamatan publik, kesehatan dan kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi tidak secara sistematis terkait dengan *fiscal stress*.

Thompson (2017) menganalisis efek dari pemberian label kepada pemerintah yang mengalami *fiscal stress* terhadap keuangan pemerintah, tingkat kejahatan, dan transaksi perumahan. Menunjukkan bahwa *fiscal stress* memberikan efek peningkatan substansial terhadap pendapatan per kapita walaupun secara statistik *fiscal stress* tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Meskipun secara statistik *fiscal stress* tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kejahatan tetapi pada kenyataannya *fiscal stress* mengakibatkan tingkat kejahatan meningkat.

Penelitian yang berfokus mengenai *fiscal stress* pada pemerintah daerah di Indonesia masih relatif sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh (Halim, 2001) menunjukkan bahwa *fiscal stress* dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan mengakibatkan adanya pergeseran kenaikan/penurunan terhadap komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. (Junita & Abdullah, 2016) menunjukkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh terhadap

perubahan belanja dengan arah negatif, dimaknai dengan semakin tinggi *fiscal stress* maka semakin kecil perubahan terhadap anggaran belanja.

Dengan demikian peneliti mengambil tingkat kejahatan dan pendapatan perkapita sebagai indikator yang berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2015.

2. KAJIAN LITERATUR

Fiscal Stress

Menurut Muryawan & Sukarsa (2016) *fiscal stress* merupakan tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya. Halim (2001) mendefinisikan *fiscal stress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi anggarannya.

Arnett (2011) mendefinisikan *fiscal stress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang maupun keuangan jangka pendeknya yang timbul dan bisa disertai dengan ketidakmampuan untuk meningkatkan pendapatan ataupun menyediakan layanan untuk publik. Literatur tentang kondisi keuangan dan pengukuran *fiscal stress* menekankan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran *fiscal stress* yang berfokus pada keuangan publik.

Pengukuran Fiscal Stress

Pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah menurut Arnett (2011) antara lain: defisit anggaran (*budget deficits*), saldo anggaran akhir tahun yang tidakdicadangkan (*year-end unserved budget balance*), penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in states's revenues performance*), peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trend*) dan rasio keuangan (*financial ratios*).

Skidmore & Scorsone (2011) pengukuran *fiscal stress* harus eksogen dengan keputusan keuangan pemerintah daerah maka dari itu mengusulkan formulasi *fiscal stress* dengan mengukur irisan antara biaya penyediaan layanan publik dan pendapatan yang dihasilkan.

Tingkat Kejahatan

Kejahatan merupakan tingkah laku manusia yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat secara ekonomis, psikologis dan melukai perasaan sosial dalam kehidupan bersama. kejahatan bersifat universal tidak terbatas ruang dan waktu yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan terjadi terhadap siapa saja. Sebagai sebuah fenomena sosial kejahatan adalah penyakit dalam sebuah komunitas yang harus di tindak lanjuti karena kejahatan merupakan sebuah pelanggaran (Maulana, 2014).

Ilmu ekonomi memandang kejahatan sebagai fenomena yang harus di tindak lanjuti karena menyebabkan dampak yang dapat menimbulkan biaya secara materil maupun non materil. Dalam analisis ekonomi kejahatan lebih banyak menggunakan data kejahatan properti. Kejahatan properti merupakan kejahatan atas harta benda, antara lain pencurian, perampokan, pembobolan rumah dan lain-lain.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk atau dengan kata lain bahwa pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah sehingga jika pendapatan besar maka masyarakat akan cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya dan dapat memenuhi kebutuhannya (Kuncoro, 2004).

Pendapatan per kapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu daerah untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dengan dilihat dari seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi (Todaro, 2006).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk menjawab masalah dan mengungkap tujuan penelitian maka sumber data penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang di peroleh dengan mengunduh laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2016 dari *website* www.djpk.kemenekeu.go.id dan *website* Badan

Pusat Statistik (BPS). Untuk populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah yang berjumlah 508 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Untuk menentukan sampel penelitian ini digunakan teknik sampling *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data statistik deskriptif dan uji regresi data panel. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *software Econometric views (Eview)*.

4. HASIL

Pada pengujian akan dilakukan penentuan metode regresi yang tepat dengan dilakukan uji *Chow* dengan alat bantu aplikasi software *Eviews 9*. Adapun variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat kejahatan dan pendapatan perkapita, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *fiscal stress*. Berdasarkan pemilihan sampel yang berjumlah 53 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat kejahatan dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*.

Tabel 1.1 Hasil Pengujian Fixed Effect Model Hipotesis 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	135.5044	2.463539	55.00396	0.0000
X?	-0.396449	0.194182	-2.041633	0.0463

Sumber: Output Eviews 9

Berdasarkan table 1.2 di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TK = 135.5044 - 0.396449(FS)$$

Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa *fiscal stress* berpengaruh terhadap tingkat kejahatan dengan arah negatif.

Tabel 1.2 Hasil Pengujian Fixed Effect Model Hipotesis 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.60069	0.814147	87.94569	0.0000
X?	-0.205451	0.064173	-3.201519	0.0023

Sumber: Output Eviews 9

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PP = 71.60069 - 0.205451 (FS)$$

Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa *fiscal stress* berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dengan arah negatif.

5. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *fiscal stress* terhadap tingkat kejahatan dan pendapatan perkapita pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2014 dan tahun 2015.

Pengaruh Fiscal Stress terhadap Tingkat Kejahatan

Setelah dilakukannya pengujian hipotesis menggunakan bantuan aplikasi *Eviews* pada 53 sampel pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, didapatkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari 0.05, yaitu sebesar 0.0463 dan nilai koefisien *fiscal stress* sebesar $-0.396449 \neq 0$, sehingga *fiscal stress* berpengaruh dengan arah yang negatif. Nilai koefisien menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan *fiscal stress* senilai satu satuan, maka tingkat kejahatan akan menurun sebesar 0.396449. Dengan demikian hal-hal tersebut membuat hasil hipotesis H_0 ditolak, sedangkan hipotesis H_1 diterima.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Thompson (2017) yang menganalisis efek dari pemberian label *fiscal stress* terhadap tingkat kejahatan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Thompson (2017) menunjukkan bahwa *fiscal stress* memberikan pengaruh terhadap tingkat kejahatan, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan tingkat kejahatan. Pada saat *fiscal stress* meningkat tingkat kejahatan pun mengalami peningkatan sebesar 6,7 kejahatan per 1000 populasi. Tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Thompson secara statistik menunjukkan bahwa *fiscal stress* tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kejahatan, walaupun pada kenyataannya *fiscal stress* mengakibatkan tingkat kejahatan meningkat.

Pengaruh Fiscal Stress terhadap Pendapatan Perkapita

Setelah dilakukannya pengujian hipotesis menggunakan bantuan aplikasi *Eviews* pada 53 sampel penelitian pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, didapatkan hasil bahwa *fiscal stress* berpengaruh secara negatif terhadap

pendapatan perkapita. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas yang kurang dari 0.05, yaitu sebesar 0.0023 dan nilai koefisien *fiscal stress* sebesar $-0.205451 \neq 0$, sehingga *fiscal stress* berpengaruh dengan arah negatif. Nilai koefisien menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan *fiscal stress* senilai satu satuan, maka pendapatan perkapita akan menurun sebesar 0.205451. Hal tersebut membuat hipotesis H_0 ditolak, sedangkan hipotesis H_1 diterima.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Thompson (2017) yang menganalisis efek dari pemberian label *fiscal stress* terhadap pendapatan perkapita. Penelitian yang telah dilakukan oleh Thompson (2017) menunjukkan bahwa *fiscal stress* memberikan efek peningkatan substansial terhadap pendapatan perkapita walaupun secara statistik *fiscal stress* tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pendapatan perkapita. Sedangkan penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *fiscal stress* berpengaruh terhadap pendapatan perkapita tetapi dengan arah yang negatif.

6. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Tingkat Kejahatan dan Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2014-2015. Adapun hasil regresi secara parsial dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa pada 53 (lima puluh tiga) pemerintah daerah di Indonesia (dengan data tahun 2014-2015), bahwa *fiscal stress* berpengaruh terhadap tingkat kejahatan secara negatif. Hasil penelitian mengindikasikan semakin besar tingkat *fiscal stress* maka akan semakin rendah tingkat kejahatannya.

Selain itu, pada 53 (lima puluh tiga) pemerintah daerah di Indonesia (dengan data tahun 2014-2015), *fiscal stress* berpengaruh terhadap pendapatan perkapita secara negatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin besar tingkat *fiscal stress* maka akan semakin rendah tingkat pendapatan perkapita, yang berarti akan semakin buruk pendapatan perkapitanya.

7. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang menjadi subyek dalam penelitian ini diharapkan dapat mengendalikan *fiscal stress* yang kemungkinan dapat terjadi, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *fiscal stress* di daerah masing-masing.
2. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang menjadi subyek dalam penelitian ini diharapkan dapat terus meningkatkan upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat agar angka tingkat kejahatan terus menurun. Hal ini pula dapat dilakukan sebagai cara strategis yang turut dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi.
3. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang menjadi subyek dalam penelitian ini diharapkan dapat terus meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan perkapita agar kemampuan daerah terus meningkat khususnya dalam melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah periode tahun anggaran tidak hanya dua tahun sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan diketahui perbandingan dari tahun ke tahun.

Daftar Pustaka

- Ajija, R. S., Sari, W. D., Setianto, R., & Primanti, M. (2011). *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arnett, S. (2011). Fiscal Stress in the U . S . States : an Analysis of Measures and Responses. Retrieved from https://smartech.gatech.edu/xmlui/bitstream/handle/1853/42860/arnett_sarah_b_201112_phd.pdf?sequence=1
- Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Kriminal. Retrieved from www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Kriminal 2018. Retrieved January 31, 2018, from <https://www.bps.go.id>
- Dengah, S., Rumat, V., & Niode, A. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012, 14(3), 71-81.
- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 3(1), 80-96.

- DiNapoli, T. P. (2018). Municipalities Designated in "Significant Fiscal Stress" Doubles. Retrieved October 28, 2018, from <https://www.osc.state.ny.us/press/releases/sept18/092518.htm>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). Data Keuangan Daerah. Retrieved October 15, 2018, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Elling, R., Krawczyk, K., & Carr, J. (2013). What Should We Do? Public Attitudes about How Local Government Officials Should Confront Fiscal Stress. *Local Government Studies*, 40(3), 380-402. <https://doi.org/10.1080/03003930.2013.823408>
- Finegold, K., Schardin, S., & Steinbach, R. (2003). How Are States Responding to Fiscal Stress? New Federalism: Issues and Options for States, 1-7.
- Forrester, J. P., & Spindler, C. J. (1990). Managing Municipal Services In An Of Declining Federal Assistance, 10(1), 63-84.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariant dan Ekonometrika (Teori, konsep, dan Aplikasi) Eviews 8*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Semarang, Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Gujarati, & Porter. (2009). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2001). Anggaran Daerah dan Fiscal Stress. *Ekonomi Dan Bisnis Mahsun*, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. *Indonesia*, 16(4), 346-357.
- Junita, A., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Fiscal Stress Dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*, 20(3). <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.10>
- Kaltara, R. (2016). Defisit Anggaran Tak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Retrieved January 7, 2019, from m.kaltara.prokal.co
- Kaltara, R. (2017). Angka Kriminalitas Naik 62,41 Persen. Retrieved January 31, 2019, from <http://kaltara.prokal.co/read/news/8785-angka-kriminalitas-naik-6241-persen.html>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Maher, C. S., & Deller, S. C. (2007). Municipal responses to fiscal stress. *International Journal of Public Administration*, 30(12-14), 1549-1572. <https://doi.org/10.1080/01900690701230184>
- Maulana, T. (2014). Pengaruh Umum, Pendidikan, Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian dengan Pendekatan Ekonomi.
- Merriam, R. E., & Chairman. (1973). *City Financial Emergencies: The Intergovernmental Dimension*.
- Muda, I. (2015). Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara, 4(1), 27-46. <https://doi.org/10.13140/2.1.3934.2880>

- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 229–252. Retrieved from <http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/9379>
- Pagano, M. (1993). *balancing cities' Books in 1992: An Assessment of City Fiscal Conditions*.
- Prawira, I.F.A., Darus, S.A. (2018). Revenue Concentration And Debt Usage : As They Affect Fiscal Distress in District Government, International Conference on Economics, Business, Enterpreneurship and Financial, 21
- Prawira, I.F.A., Septira, F. (2019). Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiskal Stress, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, vol 7 (1), 57-64.
- Reschovsky, A. (2003). The Implication of State Fiscal Stress for Local Governments. *Urban Institute Conference, State Fiscal Crises: Causes, Consequences, & Solutions*. Retrieved from <http://taxpolicycenter.org/UploadedPDF/1000612.pdf>
- Rohmana, Y. (2010). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Eviews*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Kopras, FPEB, UPI Bandung.
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan EViews*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2009). *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16(1), 40–61.
- Skidmore, M., & Scorsone, E. (2011). Causes and consequences of fiscal stress in Michigan cities. *Regional Science and Urban Economics*, 41(4), 360–371. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.02.007>
- Subana, M., & Sudrajat. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyarto. (2018). PDRB Nunukan Masih Didominasi Pertambangan dan Galian. Retrieved January 31, 2019, from <http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/26/pdrb-nunukan-masih-didominasi-pertambangan-dan-galian>.
- Thompson, P. N. (2017). Effects of fiscal stress labels on municipal government finances, housing prices, and the quality of public services: Evidence from Ohio. *Regional Science and Urban Economics*, 64(March), 98–116. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2017.03.001>
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo, D. (2015). Pengaruh pendapatan per kapita, economic growth rate , economic structure, dan tax rate terhadap tax ratio pada negara-negara oecd dan indonesia, 45–61.